BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi Politik dalam Hubungan Internasional mengemuka terutama pasca Perang Dunia Kedua. Ketika itu terjadi krisis baik itu krisis keuangan maupun krisis perdagangan yang disebabkan 3 peristiwa besar paruh awal abad ke 20 yaitu Perang Dunia Pertama, *The Great Deppresion* 1930-an dan Perang Dunia Kedua. Salah satu penyebab munculnya permasalahan dalam perekonomian dunia ketika itu adalah terjadinya politik perdagangan yang menyebabkan krisis perdagangan (Bakry, 2015:124).

Dalam kajian Hubungan Internasional globalisasi menjadi salah satu fenomena yang tidak terelakan. Dimana globalisasi identik dengan teknologi misalkan kemajuan teknologi komunikasi dan komputer yang memungkinkan mengalirnya gagasan-gagasan dan informasi yang melintas batas negara. Selain itu fenomena globalisasi juga meliputi meningkatnya hubungan ekonomi, sosial budaya yang melewati batas-batas internasional (Ball et.al, 2014:13-14). Jika kita melihat pada aspek hubungan ekonomi, globalisasi berkaitan dengan masalah perdagangan ataupun investasi.

Dengan munculnya fenomena globalisasi tentu akan meningkatkan sebuah manfaat bagi kemajuan perekonomian dunia. Misalkan saja dengan adanya fenomena globalisasi terutama perdagangan bebas hal ini akan menciptakan

pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Horst Kohler dan James Wolfensohn mengungkap, dengan memperluas perdagangan secara kolektif dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada dan ini adalah alat yang paling kuat dimana negara-negara yang bekerjasama, dapat bersama-sama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup (Ball et.al, 2014:22).

Hal senada diungkap oleh Bank Dunia *(World Bank)* yang memberikan indikator perkembangan dunia bahwa jumlah penduduk dalam kemiskinan yang ekstrim turun dari 1,5 miliar pada tahun 1981 menjadi 1,1 miliar pada 2001. Diukur dari proporsi populasi negara-negara berkembang, penurunannya 39,5 persen pada tahun 1811 menjadi 21,3 persen pada tahun 2001. Antara tahun 1981 dan tahun 1999 proporsi penduduk di Asia Timur dan daerah Pasifik yang hidup kurang dari $1 per hari turun dari 56 menjadi 16 persen. Selain itu angka melek huruf secara global tumbuh dari 52% menjadi 81 % pada tahun 1999 (Ball et.al, 2014:22). Hal ini membuktikan bahwa adanya keuntungan dari semakin terintegrasinya dunia secara global.

Dalam konteks ini globalisasi diartikan sebagai saling terkait antara dua perekonomian nasional. Dimana perekonomian tidak lagi berdasarkan pada perekonomian nasional yang otonom tetapi berdasarkan pada pasar global. Pada posisi ini perekonomian global yang tunggal mendominasi sejumlah besar perekonomian nasional (Jackson & Sorensen, 2007:228). Salah satu hal terpenting yang menjadi faktor munculnya globalisasi adalah berkaitan dengan liberalisasi perdagangan dan keuangan.

Pada tahun 1947 para ekonom dan tokoh berpengaruh Amerika Serikat dan Inggris berkumpul di New Hampshire AS, untuk membentuk sebuah lembaga yaitu sistem keuangan internasional. Dibentuknya lembaga tersebut tiada lain adalah sebagai respon terhadap kekacauan perekonomian pasca Perang Dunia Ke dua, yang menginginkan suatu tatanan ekonomi global yang stabil, sistem ini dinamakan *Bretton Words System* (Bakry, 2015:98).

Ada dua elemen utama sistem ini yaitu penggunaan sistem nilai tukar terhadap dollar AS dan kewenangan IMF *(International Moneter Found)* untuk mengatasi persoalan ketidak seimbangan pembayaran. Pada tahun 1971 Presiden Amerika Serikat Ricard Nixon mengumumkan bahwa nilai tukar dolar terhadap emas tidak dapat di pertahankan keputusan tersebut menandai berakhirnya sistem *Bretton Words* (Ashari, 2015:84).

Brown dan Ainley mengungkapkan meskipun sistem *Bretton Words* telah berakhir institusi-institusi bentukannya tetap eksis. Adapun menurutnya lembaga–lembaga warisan dari institusi *Bretton Words* adalah WTO *(World Trade Organization),* IMF *Internasional Moneter Found* dan *World Bank.* Menurutnya tebentuknya ITO *(International Trade Organization)* adalah cikal bakal GATT *(General Agreement on Tariff and Trade) /* WTO *(World Trade Organization),* yaitu sebagai depolitisasi ekonomi internasional untuk memisahkan penanganan atas berbagai isu ekonomi ke dalam institusi yang berbeda, yaitu menangani perdagangan dunia. Sementara IMF *(International Moneter Found)* mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan dana internasional dan penanganan krisis neraca pembayaran serta Bank Dunia menangani urusan pergerakan modal (Winarno,

2011:272). Sebagai salah satu produk dari *Bretton Words System*, WTO pada saat ini begitu penting terutama pasca dibentuknya lembaga ini volume ekspor perdagangan dunia mengalami peningkatan rata – rata 6% pertahun (Winarno, 2011:39) .

Rezim WTO dibentuk sebagai sarana kerjasama untuk mengatur perdagangan antar negara. Sebelum terbentuk sebagai organisasi, WTO adalah sebuah perangkat kesepakatan atau komitmen dari negara-negara yang disebut GATT. Jika kita melihat pada konteks ini prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam persetujuan GATT adalah apa yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo yang menekankan pada kepada kebebasan *(freedom),* hak individu *(individual right)* dan pasar bebas *(free markets).* Persetujuan GATT merupakan tekad dari negara-negara *Contracting Parties* untuk membentuk sebuah rezim perdagangan yang bebas dan terbuka (Bakry, 2015:29).

Kesepakatan GATT merupakan kesepakatan yang mengatur berkaitan dengan penciptaan perdagangan yang bebas dan adil dengan memfokuskan pada hambatan tarif dalam perdagangan. Pada tahun 1994 dibentuklah organisasi WTO melalui perundingan Uruguay di *Marrakech* (Marocco). Sebagai satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh negara anggota serta diratifikasi melalui parlemen. Sementara keputusan di WTO dilakukan berdasarkan konsensus (http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-%28WTO%29.aspx pada tanggal 17/05/ 2016).

Dalam perjalanannya organisasi ini melakukan berbagai perundingan perdagangan untuk dinegosiasikan melalui putaran perundingan, diantaranya perundingan Singapura tahun 1996, perundingan Jenewa tahun 1998 dan perundingan Seatlle tahun 1999 (http://www.kemendag .go.id/id/faq pada tanggal 17/05/2016).

Pada tahun 2001 perundingan kembali dilakukan di Doha, Qatar dalam perundingan ini dibahas agenda mengenai, liberalisasi produk dan perdagangan di bidang pertanian, produk industri, dan jasa serta berkaitan dengan aturan pengetatan untuk tindakan anti-dumping dan perlindungan serta kebijakan investasi. Salah satu keberhasilan besar negara-negara berkembang dan negara eksportir produk pertanian dalam perundingan ini adalah dimuatnya mandat mengenai "pengurangan, dengan kemungkinan penghapusan, sebagai bentuk subsidi ekspor". Selain itu juga pada perundingan ini diluncurkan *Doha Development Agenda* sebagai bagian dalam proses perundingan WTO (http:// www.kemendag.go.id/id/faq pada tanggal 24 /04/ 2016).

Dalam putaran ini dihasilkan sebuah mandat berkaitan dengan penurunan tarif pertanian antara 45 hingga 75 persen bagi Negara maju serta antara 35 hingga 75 persen bagi Negara berkembang (kecuali bagi negara tertinggal tidak diminta melakukan penurunan tarif pertanian apapun) Selain itu jika mandat perundingan atau skenario Doha dijalankan, dapat memberikan keuntungan (total, perkapital, sebagai persentasi PDB) sebesar $96 miliar, dimana sebesar $80 miliar akan lari ke Negara maju (sebesar $79,04 per kapital dan 0,24 persen dari PDB-nya) serta

$16 miliar akan lari ke Negara berkembang (sebesar $3,13 per kapital dan 0,14 persen dari PDB-nya) (Salvatore, 2014:296-297).

Tahun 2003 perundingan kembali dilakukan di Cancun Mexico, sebagai perundingan untuk dinegosiasikan berkaitan dengan mandat Doha, yang di harapkan pada tahun 2004 atau awal tahun 2005 liberalisasi perdagangan mulai di laksanakan. Pada pertemuan ini diwarnai oleh perbedaan kepentingan antara Negara maju dan Negara berkembang. Masalah utama yang menjadi penyebab kegagalan tersebut adalah isu Pertanian sebab masalah pertanian mempunyai implikasi yang sangat sarat dengan kepentingan sosial dan politik. Dalam pertemuan ini tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang konkrit (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=422&detail=true pada tanggal 18/05/ 2016).

Pada perundingan ini, isu pertanian diwarnai dengan munculnya *joint paper* AS-UE, proposal Group 20 (yang menentang proposal gabungan AS-UE) dan proposal Group 33 (yang memperjuangkan konsep *special product* dan *special safeguard mechanism*). Secara singkat, *joint paper* AS-UE antara lain memuat proposal yang menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di Negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tinggi di Negara maju. Sebaliknya, Negara berkembang yang tergabung dalam Group 20 menginginkan adanya penurunan subsidi domestik *(domestik support)* dan penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana

dimandatkan dalam Deklarasi Doha (http://www.kemendag.go.id/id/faq pada tanggal 17/05/2016).

Pada perundingan ini terjadi kebuntuan negosiasi dimana negara maju menginginkan pembicaraan isu baru terutama berkaitan dengan liberalisasi, yang tentu negara maju dapat memanfaatkan ini, namun disisi lain negara berkembang dan LDCs menginginkan penyelesaian masalah pertanian terutama dampak dari subsidi ekspor Amerika Serikat dan keterbukaan akses pasar ke negara tersebut. Dimana Amerika Serikat sangat mendorong berkaitan dengan hal ini. Dan hal ini lah yang menjadi kebuntuan dalam perundingan di Cancun (http://www. globalissues.org/article/438/wto-meeting-in-cancun-mexico-2003 diakses pada tan ggal 03/-8/2016).

Selain itu protes muncul dari presiden Federasi Petani Korea Selatan Lee Kyong Hae. dikarenakan Amerika Serikat dan negara Utara konsisten dengan subsidi dan proteksi dalam pertaniannya yang menyebabkan kompetisi yang tidak sehat. Dalam perundingan ini negara –negara berkembang memprotes berkaitan dengan masalah proteksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap pembisnis besar dan juga berkaitan dengan privatisasi air, hutan dan tanah (Jacques, 2006:5).

Dalam pertemuan ini protes Korea Selatan berkaitan dengan subsidi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap industri pertanian yaitu berupa subsidi ekspor. Impor dari AS tersebut menghancurkan petani Korea. Dalam Draft kedua dari teks menteri, yang diterbitkan di Cancun, membuat jelas bahwa AS dan U.E. yang tidak bersedia untuk melakukan pemotongan yang signifikan dalam subsidi pertaniannya bahkan disaat AS menuntut agar negara-

negara berkembang menurunkan tarif dalam pertanian (http://www.yesmagaz ine.org/issues/whose-water/the-meaning-ofcancun pada tanggal 18/05/2016).

Selain itu protes juga muncul dari negara anggota G-20 yaitu India dan Brazil. Dalam perundingan ini India berkomitmen sebagaimana yang diungkap oleh menteri perdagangannya, India akan berjuang terutama bagi pemotongan subsidi pertanian negara-negara maju. Selain itu juga tidak akan ada kompromi bagi India bila berbicara tentang kepentingan 650 milyar petani. India juga akan berusaha memperjuangkan *special and preferential treatment* untuk negara-negara berkembang. Sementara Brazil melalui menteri luar negeri Celso Amorim mengataka, Brazil dan India telah bersama-sama menolak proposal pertanian AS-Uni Eropa karena akan merugikan kepentingan produsen petani di negara berkembang (http://www.elsppat.or.id/download/file/CU1.pdf pada tanggal 30/0 7/2016). Sehingga dalam perundingan ini negara-negara berkelompok terutama dalam negosiasi pertanian.

Tahun 2005 pertemuan tingkat menteri dilakukan di Hongkong. Dalam pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Menteri mencakup tiga pilar di bidang pertanian. Pada pilar bantuan domestik disepakati jumlah range angka bagi pemotongan bantuan keseluruhan dan bantuan yang mendistorsi perdagangan (AMS). Negara berkembang tanpa komitmen AMS tidak harus mendapatkan pemotongan tarif dan bantuan keseluruhan. Pada pilar kompetisi ekspor disepakati batas waktu penghapusan seluruh bentuk bantuan ekspor (*export subsidies)* (http://www.antaranews.com/print/111479/perjalanan-panjang-terbentu knya-sistem-perdagangan-internasional).

Pada tahun 2008 pertemuan WTO kembali dilakukan di Jenewa Swiss, dalam perundingan ini isu pertanian yang dibahas adalah akses pasar, subsidi ekspor dan subsidi domestik. Negara berkembang menuntut negara maju memangkas subsidi pertaniannya dan membuka pasarnya bagi produk pertanian negara berkembang. Tahun 2007 di perkirakan Amerika Serikat memberi suntikan dana bagi petani dan peternak sebesar hampir 260 milyar dolar Amerika Serikat. Hampir seperempat penghasilan petani negara maju berasal dari bantuan dana tersebut, selain itu Amerika Serikat dibawah pemerintahan George W Bush berkomitmen tidak akan menyepakati apapun selama negara berkembang tidak membuka pasarnya (http://www.dw.com/id/putaran-perundingan-doha-di-jenewa/a-3507326-0 pada ta nggal 17/05/2016).

Pertemuan WTO tingkat menteri kembali dilakukan di Bali, Indonesia. Pada pertemuan resmi tingkat menteri ini, terjadi sebuah kesepakatan yang berkaitan dengan paket pertanian, salah satunya dimana proteksi negara berkembang diberikan oleh negara maju. Negara maju juga berkomitmen untuk mengurangi subsidi pertaniannya (http://economy.okezone.com/read/2013/12/10/320/910062/mendag-banggakan-3-paket-hasil-wto-di-bali pada tanggal 18/05/2016). Dalam pertemuan pasca Cancun dilakukan juga pertemuan- pertemuan mini menteri maupun pertemuan resmi.

Martin Khor mengungkap proteksi dan subsidi tetap saja diberlakukan dengan sangat tinggi oleh Amerika Serikat terutama dalam bidang pertanian. Dimana kesepakatan yang diatur oleh WTO mengarahkan pada kesepakatan liberalisme impor. Yaitu pengurangan bantuan domestik serta subsidi ekspor bagi

produk - produk pertanian khusunya negara-negara kaya (Asrudin, 2009:95).

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling gencar menyerukan perlunya kedisiplinan negara-negara anggota WTO dalam merealisasi komitmen mereka dalam persetujuan bidang pertanian. Namun demikian, pada saat yang sama Amerika Serikat juga meningkatkan subsidi domestiknya terhadap sektor pertaniannya sehingga banyak negara terutama negara-negara berkembang memprotes Amerika Serikat .

Hal tersebut dapat dilihat dorongan Amerika Serikat terhadap WTO berkaitan dengan reformasi perdagangan. Diantaranya subsidi ekspor, Amerika Serikat menginginkan subsidi ekspor dan kredit ekspor dihapuskan agar mendorong kompetisi ekspor yang *fair*. Selain itu, mengenai *State Trading Enterprise* (STE), Amerika Serikat mengusulkan untuk menghapuskan peranan badan usaha milik negara yang mempunyai hak monopoli dalam melakukan ekspor dan impor produk-produk pertanian. Lebih lanjut, Amerika Serikat menuntut agar STE menotifikasi harga produk dan berbagai informasi mengenai penjualan produk tersebut kepada WTO, serta meminta agar jaminan asuransi oleh pemerintah dihapuskan (http://www.fas.usda.gov/itp/wto/proposal.htm pada tanggal 18/05/2016).

Jika kita melihat pada sektor pertanian di Amerika Serikat meskipun sektor ini tidak sebesar sektor lain namun sektor tersebut cenderung mendapat perhatian signifikan dalam program legislasi nasional di Amerika Serikat. Proteksi yang dilakukan negara kepada sektor ini misalnya berupa kebijakan-kebijakan yang mendorong ekspor (Bakry, 2015:118). Dapat dilihat pada Tabel 1.2 proteksi

berupa subsidi pertanian yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat pada tahun 2002- 2008.

Tabel 1.1

Subsidi Pertanian Amerika Serikat pada tahun 2002 sampai 2008

Negara	Juta Dolar Amerika						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Amerika Serikat	1,222	1,684	1,540	1,461	1,464	1,618	2,045

Sumber: Farm.ewg.org

Pada tabel diatas dapat dilihat bantuan yang disediakan Amerika Serikat untuk pertaniannya dalam juta dollar AS pada tahun 2002 dan 2008. Dari tabel tersebut, subsidi yang diberikan Amerika Serikat pada periode tersebut cenderung meningkat.

Kebijakan pemberian subsidi Amerika Serikat dibawah pemerintahan George W Bush dalam sektor pertaniannya cukup besar, hal ini dapat dilihat pada *Farm Security and Rural Investment Act of* 2002 (FSRIA) yaitu program untuk pertanian Federal periode 2002-2007, ditandatangani menjadi undang-undang pada 13 Mei 2002. Dan dilanjutkan pada program *The Food, conservasion*, dan *Energi Act of* 2008 dan disahkan menjadi undang-undang oleh Kongres Amerika Serikat pada 18 Juni 2008. Dapat dilihat peran pemerintah Amerika Serikat dalam sektor ini cukup besar diantaranya, pemerintah Amerika Serikat mengawasi dan memiliki otoritas penuh dalam ekspor komoditas pertanian ke luar negeri, selain itu pemerinta Amerika Serikat memberikan program bantuan pinjaman dan

pembayaran serta mengatur investasi pertanian. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan program jaminan kredit eksport, jaminan kesehatan dan program subsidi langsung komoditas pertanian dan program konservasi (http://www. ers.usda.gov/publications/ap-administrative-publication/ap-022.aspx diakses pada tanggal 07/06/2016).

Subsidi yang diberikan yang terdiri dari gandum, beras, susu, gula, jagung, madu, kedelai, kacang-kacangan, sayuran dan lainnya, sebesar US$177,589, 342,975 (Daniah, 2008:186).

Penelitian berkaitan dengan masalah pedagangan bebas kerap dilakukan terutama dalam jurnal ilmiah diantaranya oleh Ramandika Kawardana mahasiswa prodi Hubungan Internasional Univeritas Airlangga dengan judul "Perdagangan bebas dan proteksionisme di WTO: studi kasus kebijakan industri baja di AS (2000-2004)" dalam penelitiannya lebih menekankan kebijakan proteksi Amerika di bidang industri baja yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang melanggar terhadap prinsip dari perdagangan bebas WTO. Persaman dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan konsep perdagangan bebas WTO yang bertentangan dengan proteksionisme. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah peneliti lebih menekankan permasalahan negosiasi di WTO yang dikaitkan dengan kebijkan pertanian Amerika Serikat berupa proteksi subsidi.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Rahma Daniah yang dimuat dalam Jurnal Spirit Publik dari Universitas Mulawarman Prodi Hubungan Internasional dengan judul "Analisis kebijakan publik pertanian Amerika Serikat dalam

implementasi publik law 107-171: *Farm security and rulal investment of 2002 pasca agreement on agriculture"*.

Dalam penelitian tersebut Rahma Daniah lebih menekankan pada aspek hukum terutama berkaitan dengan implemetasi *agreement on agriculture*, hal yang dibahas lebih pada kebijakan publik yang dilakukan oleh Amerika Serikat di negaranya. Dalam penelitian ini ada kesamaan terutama berkaitan dengan variabel independen yaitu proteksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap sektor petaniannya.

Selain itu penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aspari Aulia Rahmawati Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya. Dengan judul "analisis kebijakan proteksi Uni Eropa terhadap impor daging Amerika Serikat". Dalam penelitiannya Aspari menekankan pada Analisis terhadap Proteksi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap sektor pertanian khususnya daging sapi yang melarang masuknya produk impor dagi sapi dari Amerika Serikat. Persamaan dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel independen yaitu porteksi pertanian yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Amerika Serikat.

Dengan demikian terjadi kontradiktif yang menurut peneliti perlu dicari jawaban berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana keberlangsungan rezim perdagangan bebas WTO dengan adanya kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan memilih rezim perdagangan bebas WTO sebagai

objek penelitian skripsi, maka dengan ini peneliti membuat skripsi dengan judul penelitian :

"Keberlangsungan Rezim Perdagangan Bebas *World Trade Organizations* (WTO) Dengan Adanya Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat"

Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini didukung oleh mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain :

1. Ekonomi Politik Internasional merupakan kajian yang membantu peneliti memberikan gambaran konseptual berkaitan dengan kebijakan proteksi.
2. Bisnis Internasional merupakan kajian yang membantu peneliti memberikan penjelasan berkaitan dengan konsep perdagangan Bebas dan membahas perdagangan internasional.
3. Organisasi internasional merupakan kajian yang membantu peneliti memberi gambaran dan penjelasan berkaitan dengan Rezim Internasional yaitu rezim perdagangan bebas WTO.
4. Regionalisme merupakan kajian yang membantu peneliti memberi gambaran dan penjelasan berkaitan pengelompokan regional bebasis kedekatan perdagangan, saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan serta keikutsertaan dalam organisasi merujuk pada WTO.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah major sebagai berikut **"Bagaimana Keberlangsungan Rezim Perdagangan Bebas *World Trade Organizations* (WTO) Dengan Adanya Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat"**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan Masalah Mayor kemudian diturunkan pada Rumusan masalah minor. Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah minor sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan rezim perdagangan bebas WTO sebelum pertemuan Cancun?
2. Bagaimana perkembangan perundingan WTO pasca pertemuan Cancun?
3. Bagaimana kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat Pasca Pertemuan Cancun?
4. Sejauhmana keberlangsungan rezim perdagangan bebas WTO dengan dilakukannya putaran perundingan pasca Cancun ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan lingkup kajian penelitian maka peneliti membatasi masalah berkaitan dengan keberlangsungan perdagangan bebas WTO rentan waktu 2001-2015. Sementara berkaitan dengan kebijakan pertanian Amerika Serikat yang dilakukan pasca putaran Cancun, yang membahas pengurangan tarif di bidang pertanian dalam perundingan WTO terutama pada masa pemerintahan

Presiden George W Bush. alasan peneliti memilih rentan waktu tersebut terjadinya kebijakan pertanian proteksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat berupa subsidi dan terjadinya proses perundingan-perundingan berkaitan dengan negosiasi pertanian dalam institusi WTO dimulai parundingan Doha tahun 2001, perundingan Cancun tahun 2003 dan perundingan Jenewa tahun 2008 perundingan Bali 2013 serta perundingan Nairobi Kenya 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah terjadi permasalah yang menurut peneliti harus dicari jawaban terutama berkaitan bagaimana menyikapi masalah yang terjadi, dan bagaimana sikap yang harus diambil dalam era perdagangan bebas. Maka menjadi maksud peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana keberlangsungan perdagangan bebas WTO dengan adanya kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana perkembangan rezim perdagangan bebas WTO sebelum pertemuan Cancun?
2. Untuk menjelaskan bagaimana perkembangan perundingan WTO pasca pertemuan Cancun?
3. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat Pasca Pertemuan Cancun?

4. Untuk menjelaskan sejauhmana keberlangsungan rezim perdagangan Bebas WTO dengan dilakukannya putaran perundingan pasca Cancun?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat mengembangkan konsep dan teori yang telah di dapat dan diterapkan dalam penelitian ilmiah. Berupa ekonomi politik internasional berkaitan dengan konsep proteksi, bisnis internasional berkaitan dengan konsep perdagangan bebas dan organisasi internasional yaitu rezim yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu WTO.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Dapat menjadi bahan referensi, masukan, dan tambahan pengetahuan bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian dengan tema yang relevan.